

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari pihak lain. Data yang digunakan adalah dalam penelitian ini di ambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Lampung serta data menggunakan data non keuangan, seperti ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah dan jumlah SKPD. Sumber data LKPD yang di kumpulkan di peroleh dari laporan hasil pemeriksaan Tahun 2015, melalui situs www.bpk.go.id sedangkan data non keuangan diperoleh dari website resmi pemerintah daerah Provinsi Lampung. Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung:

**Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria**

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2015.	15
2	Kabupaten/ Kota yang tidak masuk kriteria sample	(1)
3	Total Sampel Penelitian	14

Sumber : *www.bps.go.id* data diolah 2017.

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2015. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tidak memiliki laporan realisasi LKPD pada tahun Anggaran 2015 sebanyak 1 kabupaten. Sehingga total observasi penelitian ialah 14 Kabupaten/Kota.

4.1.2 Deskripsi Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Sampel dipilih dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ringkasan sampel penelitian disajikan dalam tabel 4.2:

Tabel 4.2
Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2015 dan
sesuai dengan kriteria sampel

NO	KABUPATEN/KOTA
1	KAB. LAMPUNG BARAT
2	KAB. LAMPUNG SELATAN
3	KAB. LAMPUNG TENGAH
4	KAB. LAMPUNG TIMUR
5	KAB. LAMPUNG UTARA
6	KAB. MESUJI
7	KAB. PESAWARAN
8	KAB. PRINGSEWU
9	KAB. TANGGAMUS
10	KAB. TULANG BAWANG
11	KAB. TULANG BAWANG BARAT
12	KAB. WAY KANAN
13	KOTA BANDAR LAMPUNG
14	KOTA METRO

Sumber: Olah Sendiri

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan pencandraan atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan hanya nilai maksimum, minimum, standar deviasi dan *mean*. Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif dari variabel-variabel independen observasi.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Daerah	14	1.0701	1.0887	1.078666	.0059048
Tingkat Kekayaan	14	.0178	.2337	.079850	.0715928
Status Daerah	14	1	2	1.86	.363
Belanja Daerah	14	-.8557	-.2109	-.611850	.1651850
Jumlah SKPD	14	30	55	41.36	8.643
Pengungkapan LKPD	14	.2059	.5588	.329832	.0887456
Valid N (listwise)	14				

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan informasi tentang gambaran data yang digunakan dalam penelitian ini. Dari 14 data tersebut dapat diketahui nilai minimum dari ukuran daerah adalah 1,070 sedangkan nilai maksimum didapat 1,088. Rata-rata yang dimiliki observasi dalam ukuran daerah yaitu dinilai 1,078 dan standar deviasinya 0,005. Sedangkan nilai minimum dari tingkat kekayaan sebesar 0,017 nilai maksimum sebesar 0,233. Nilai rata-rata tingkat kekayaan sebesar 0,079 dan standar deviasi 0,071. Sedangkan nilai minimum dari status daerah minimum 1 dan nilai maksimum 2. Nilai rata-rata status daerah 1,86 dan standar deviasi 0,363. Sedangkan nilai minimum dari jumlah SKPD 30 dan nilai maksimum 55. Nilai rata-rata jumlah SKPD sebesar 41,36 dan standar deviasi 8,643. Sedangkan Pengungkapan LKPD mempunyai nilai minimum sebesar 0,205 dan nilai maksimum sebesar 0,55 dengan nilai rata – rata pengungkapan LKPD sebesar 0,329 dan nilai standar deviasiasi sebesar 0,088.

4.2 Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas Data

Menurut Imam Ghozali (2011:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi. Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Tabel 4.4 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.03131595
	Absolute	.108
Most Extreme Differences	Positive	.074
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.405
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data diolah SPSS v20

Pada hasil uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnovse* besar 0,405 dan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* pada semua variabel dependen maupun independen sebesar 0,997. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikan dengan uji *one sampel kolmogorov-smirnov* untuk semua variabel lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal dan penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan alat uji parametik (Ghozali,2011).

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas Menurut Imam Ghozali (2011:105) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Ukuran Daerah	.577	1.734
Tingkat Kekayaan	.386	2.591
Status Daerah	.476	2.099
Belanja Daerah	.781	1.280
Jumlah SKPD	.731	1.369

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : data diolah SPSS v20

Berdasarkan uji multikolinieritas diatas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan bahwa variabel – variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 yang berarti bahwa korelasi antara variabel bebas tersebut nilainya kurang dari 100%. Dan hasil dari perhitungan *varian inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa variabel – variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu sebesar). Dimana jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas (Imam Ghozali (2011:105).

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2011:110). Dengan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.936 ^a	.875	.798	.0399202	2.317

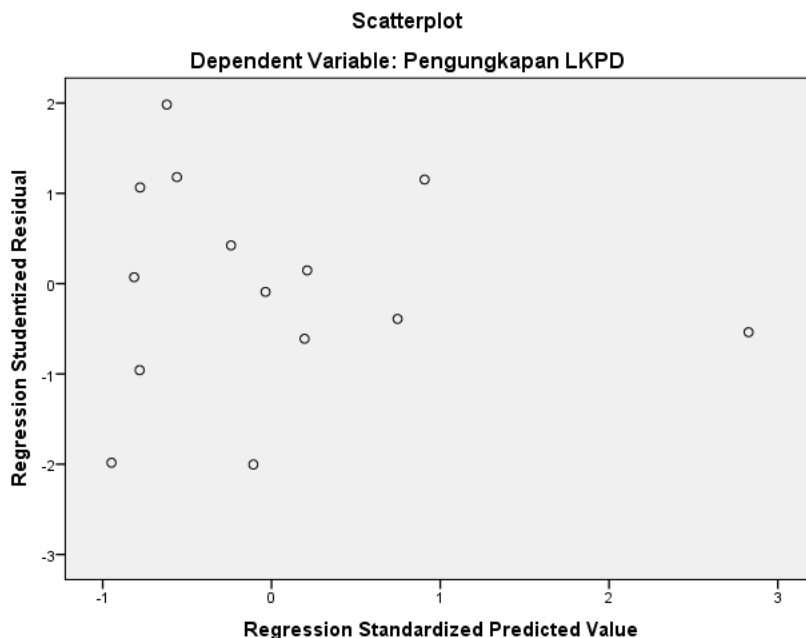
- a. Predictors: (Constant), Jumlah SKPD, Status Daerah, Ukuran Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Kekayaan
- b. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : data diolah SPSS v20

Nilai DW sebesar 2,317 nilai ini jika dibandingkan dengan nilai table dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% dengan jumlah sampel sebanyak 14 serta jumlah variabel independent (K) sebanyak 5, maka ditabel durbin Watson akan didapat nilai dl sebesar 1,505 dan sebesar 1,826. Dapat di ambil kesimpulan bahwa: $du \leq dw$, yang artinya nilai dw (2,317) lebih besar dari nilai du (1,826). Maka dapat di ambil keputusan tidak ada autokorelasi positif pada model regresi tersebut.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah SPSS v20

Berdasarkan gambar Scatterplot pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak namun tidak tersebar secara baik, karena titik-titik tersebut lebih banyak mengumpul dibawah titik nol pada sumbu Y. Tetapi titik-titik tersebut juga ada yang menyebar diatas angka nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Regresi Berganda

Pengujian regresi berganda digunakan untuk meramalkan atau mengetahui apakah variabel independen.

Tabel 4.7 Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7.486	2.655		-2.820	.022
Ukuran Daerah	6.971	2.469	.464	2.823	.022
Tingkat Kekayaan	.833	.249	.672	3.347	.010
Status Daerah	.160	.044	.654	3.616	.007
Belanja Daerah	.282	.076	.524	3.714	.006
Jumlah SKPD	.003	.001	.248	1.698	.128

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : data diolah SPSS v20

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$\text{Mandatory} = -7,486 - 6,971 \text{ UD} - 0,833 \text{ TK} - 0,160 \text{ SD} + 0,282 \text{ PD} - 0,003 \text{ JS} + E$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas terlihat bahwa:

- Apabila nilai UD, TK, SD, PD, JS bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 = 0$)

Maka pengungkapan LKPD akan bertambah sebesar -7,486.

- b. Apabila nilai UD (X1) dinaikan sebanyak 1x dengan TK, SD, PD, JS bersifat konstan (X2, X3, X4, X5 = 0) Maka akan pengungkapan LKPD bertambah sebesar 6,971.
- c. Apabila nilai TK (X2) dinaikan sebanyak 1x dengan UD, SD, PS, JS bersifat konstan (X1, X3, X4, X5 = 0) Maka pengungkapan LKPD akan bertambah sebesar 0,833.
- d. Apabila nilai SD (X3) dinaikan sebanyak 1x dengan UD, TK, PS, JS bersifat konstan (X1, X2, X4, X5 = 0) Maka pengungkapan LKPD akan bertambah sebesar 0,160.
- e. Apabila nilai PS (X4) dinaikan sebanyak 1x dengan UD, TK, SD, JS bersifat konstan (X1, X2, X3, X5 = 0) Maka pengungkapan LKPD akan bertambah sebesar 0,282.
- f. Apabila nilai JS (X5) dinaikan sebanyak 1x dengan UD, TK, SD, PS bersifat konstan (X1, X2, X3, X4 = 0) Maka pengungkapan LKPD akan bertambah sebesar 0,003.

4.3.2 Uji Kofesien Determinasi (R²)

Ketepatan model (R square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Tabel 4.8 Uji Determinasi R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.936 ^a	.875	.798	.0399202	2.317

a. Predictors: (Constant), Jumlah SKPD, Status Daerah, Ukuran Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Kekayaan

b. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : data diolah SPSS v20

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 20 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,798. Hal ini berarti

79,8% pengungkapan LKPD dapat dijelaskan oleh Ukuran Daerah, Status Daerah, Tingkat Kekayaan, Pendapatan Daerah, Jumlah SKPD. Sedangkan sisanya yaitu 20,2% Pengungkapan LKPD dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji F

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 98% atau α sebesar 0,02 dari hasil output SPSS yang diperoleh, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka model dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini dan sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ Maka Model dikatakan tidak layak, atau dengan signifikan ($Sig < 0,05$) maka model dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.9 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.090	5	.018	11.249	.002 ^b
	Residual	.013	8	.002		
	Total	.102	13			

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

b. Predictors: (Constant), Jumlah SKPD, Status Daerah, Ukuran Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Kekayaan

Sumber : data diolah SPSS v20

Dari tabel tersebut terlihat bahwa F_{hitung} sebesar 11,249 sedangkan F_{tabel} diperoleh melalui tabel F ($Dk = k-1$, $Df: n-k-1$) sehingga $Dk: 5-1 = 4$, $Df: 14-5-1 = 8$, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,840 artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,592 > 3,840$) dan tingkat signifikan p- value $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$), dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, model diterima dan penelitian dapat diteruskan ke penelitian selanjutnya. Hal ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.3.4 Uji T

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T pada tingkat kepercayaan 95% atau α sebesar 0,05 dari hasil output SPSS yang diperoleh, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, Maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau dengan signifikan (Sig) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya apabila signifikan (Sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.10 Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7.486	2.655		-2.820	.022
Ukuran Daerah	6.971	2.469	.464	2.823	.022
Tingkat Kekayaan	.833	.249	.672	3.347	.010
Status Daerah	.160	.044	.654	3.616	.007
Belanja Daerah	.282	.076	.524	3.714	.006
Jumlah SKPD	.003	.001	.248	1.698	.128

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : data diolah SPSS v20

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat t_{hitung} untuk setiap variabel sedangkan t_{tabel} diperoleh melalui tabel T (α : 0.05 dan df: n-5) sehingga α : 0.05 dan Df: 14-5= 9 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,833. Maka dapat di ambil kesimpulan setiap variabel adalah sebagai berikut:

- Variabel Ukuran Daerah (X1) nilai t_{hitung} sebesar 2,823 yang artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,823 < 1,833$) dan tingkat signifikan sebesar $0,022 < 0,05$, yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh ukuran daerah terhadap pengungkapan LKPD.
- Variabel Tingkat Kekayaan (X2) nilai t_{hitung} sebesar 3,347 yang artinya bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($3,347 < 1,833$) dan tingkat signifikan sebesar $0,010 > 0,05$, yang

bermakna bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak maka ada pengaruh tingkat kekayaan terhadap pengungkapan LKPD.

- c) Variabel Status Daerah (X3) nilai t_{hitung} sebesar 3,616 yang artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,616 > 1,833$) dan tingkat signifikan sebesar $0,007 < 0,05$ yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh status daerah terhadap pengungkapan LKPD.
- d) Variabel Belanja Daerah (X4) nilai t_{hitung} sebesar 3,714 artinya bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($3,714 < 1,833$) dan tingkat signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ yang bermakna bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak maka ada pengaruh pendapatan daerah terhadap pengungkapan LKPD.
- e) Variabel Jumlah SKPD (X5) nilai t_{hitung} sebesar 1,698 artinya bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,698 < 3,412$) dan tingkat signifikan sebesar $0,128 > 0,05$ yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka tidak ada pengaruh Jumlah SKPD terhadap pengungkapan LKPD.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Pengungkapan LKPD

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Hasil uji regresi menunjukkan nilai sig. 0,022. Hal ini berarti bahwa daerah dengan aset daerah yang besar akan mengungkapkan laporan keuangan Pemda yang lebih luas. Pemerintah Daerah yang berukuran besar berarti bahwa Pemda tersebut memiliki aset daerah yang lebih besar. Besarnya aset daerah tersebut berarti pula bahwa Pemda memiliki item-item penyusun aset seperti aset tetap maupun aset lancar yang lebih banyak. Kondisi demikian memungkinkan pemerintah daerah akan mengungkapkan LKPD yang lebih luas. Adanya pengaruh antara ukuran pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan wajib LKPD kemungkinan juga dikarenakan pemerintah daerah dengan total aset yang lebih besar dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk merekrut pegawai-pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi sehingga pengungkapan laporan keuangan yang mereka susun juga

lebih baik (Arifin dan Fitriasaki, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian; Arifin dan Fitriasaki (2014); Pratama dkk. (2015). Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian; Setyowati (2016); dan Suhardjanto dan Lesmana (2010). Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mendorong pemerintah daerah tersebut untuk mengungkapkan informasi keuangan secara lengkap. Pemerintah daerah yang besar cenderung semakin dikenal oleh publik dan memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks. Sehingga tidak bisa dipungkiri, semakin kompleks pengelolaan keuangan, maka akan semakin banyak informasi-informasi keuangan yang dimiliki dan dapat diungkapkan dibanding pemerintah daerah yang ukurannya lebih kecil.

4.4.2 Pengaruh Tingkat Kekayaan Terhadap Pengungkapan LKPD

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel tingkat kekayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Hasil uji regresi menunjukkan nilai sig. 0,010. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah akan semakin mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan keuangannya. Tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga bisa dianggap sebagai wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya, hal ini merupakan sinyal positif bagi daerah baik secara ekonomi maupun politis. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis pertama bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) dan Liestiani (2008) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah, semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan. Peningkatan pengungkapan dikarenakan pemerintah provinsi memiliki kekayaan yang lebih besar yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan. Hasil penelitian ini

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al* (2005), Martani dan Annisa (2012), Rahman *et al* (2013), Puspita dan Dwi (2012) dan Christiaens (1999) dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) , Laswad *et.al.* 2005), serta Liestiani (2008) juga menemukan bahwa kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota

4.4.3 Pengaruh Status Daerah Terhadap Pengungkapan LKPD

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel status daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Hasil uji regresi menunjukkan nilai sig. 0,007. Dengan adanya kontrol sosial tersebut, tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan (Herminingsih, 2009) dalam Suhardjanto *et al*, 2010. Perbedaan karakteristik antara masyarakat kota dan kabupaten inilah yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Status daerah berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara umum baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama yaitu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (Wikipedia.com, 2010). Selain itu, kedudukan Kabupaten dan Kota adalah sama/sejajar yaitu di bawah provinsi atau biasa disebut dengan Daerah Tingkat II. Persamaan di atas dimungkinkan menjadi faktor status daerah tidak mempengaruhi pengungkapan wajib. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Retnoningsih (2010)

4.4.4 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pengungkapan LKPD

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Hasil uji regresi menunjukkan nilai

koefisien sebesar 0,076 (B) dan nilai sig. 0,006. Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tidak bergantung pada besarnya Pendapatan Daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama et.al (2015) yang menyebutkan bahwa pendapatan daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita (2011) yang menemukan bahwa pemerintah yang memiliki Pendapatan Daerah yang tinggi tidak secara otomatis melakukan pengungkapan dengan konten informasi yang tinggi. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Amalia (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

4.4.5 Pengaruh Jumlah SKPD Terhadap Pengungkapan LKPD

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Jumlah SKPD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Hasil uji regresi menunjukkan nilai sig. 0,128. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah tersebut. Jumlah SKPD merupakan proksi dalam menjelaskan kompleksitas pemerintah. Semakin kompleks suatu pemerintahan dapat berarti semakin banyak jumlah SKPDnya. Semakin banyak jumlah SKPD semakin banyak informasi yang harus diungkapkan sebagai upaya mengurangi asimetri informasi dan menunjukkan kinerja *steward* yang semakin baik. Selain itu, semakin banyaknya jumlah SKPD dalam suatu pemerintahan akan mengakibatkan

pemenuhan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin tinggi. Semakin banyak diferensiasi fungsional dalam pemerintah daerah akan semakin banyak ide, informasi, dan inovasi yang tersedia terkait pengungkapan (Mandasari, 2009). semakin tinggi jumlah SKPD maka semakin tinggi tingkat pengungkapan LKPDnya, sebaliknya apabila jumlah SKPD mempunyai nilai koefisien negatif berarti semakin tinggi jumlah SKPD maka semakin rendah tingkat pengungkapan LKPDnya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Patrick (2007) dan Suhardjanto et al. (2010) yang berpendapat bahwa semakin banyak jumlah SKPD proses kooperasi dan koordinasi antar SKPD akan semakin rumit. Kondisi tersebut akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengontrol kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi oleh tiap SKPD.